

KAPASITAS TPK (TIM PENDAMPING KELUARGA) BERPERSPEKTIF GENDER DALAM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN ENREKANG

Musrayani Usman¹, Nuvida RAF², Rahmat Muhammad³, Muhammad Andi Arif⁴,
Mario⁵, Saidang⁶.

^{1,2,3,4}Universitas Hasanuddin, musrayani.usman@unhas.ac.id

⁵Universitas Negeri Makassar, mariosm@unm.ac.id

⁶Universitas Muhammadiyah Enrekang, saidangsaid03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada pemberdayaan berbasis gender dalam konteks ketahanan keluarga, dengan penekanan pada kesetaraan, keadilan dan partisipasi yang menekankan pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting, termasuk tingginya angka stunting, pernikahan anak dan tingginya angka perceraian. Di Kabupaten Enrekang, terjadi penurunan ketahanan keluarga secara menyeluruh, sehingga pendamping berbasis masyarakat lokal dengan perspektif gender menjadi sangat diperlukan. Tim pendamping (TPK) keluarga berperan sebagai agen perubahan utama. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemberian pendidikan kepada TPK dan tindakan yang dilakukan. Ketidaksesuaian ini bisa teratasi karena sifat manusia yang ingin tahu dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya pemberdayaan berbasis gender dalam konteks ketahanan keluarga dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Pengambilan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dari tahun 2022 hingga 2023.

Kata kunci: Pendamping; Ketahanan keluarga; Pemberdayaan gender; Enrekang.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan ditargetkan mengalami penurunan pada tahun 2024 (Hatimah & Dadang Yunus Lutfiansyah, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan mandat kepada BKKBN, Salah satu program yang berfokus pada pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, yang menganggap keluarga sebagai pilar pembangunan dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya bersama, kesadaran yang tinggi, serta kolaborasi antar sektor, diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, teori pendampingan sosial memberikan kerangka yang dapat digunakan untuk merancang intervensi atau program pemberdayaan yang efektif. Dalam konteks pemberdayaan berbasis gender dalam ketahanan keluarga, teori ini digunakan untuk mengembangkan pendekatan, melibatkan dukungan kolektif, interaksi sosial yang responsif dan kontinuitas pendampingan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang pada tahun 2022, terdapat 88 kasus perkawinan anak di bawah umur yang ditangani. Pada data pengadilan agama Enrekang, terdapat 171 kasus perceraian dan keluarga tunggal

pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 kasus cerai gugat diajukan oleh wanita, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan masalah kehidupan yang tidak nyaman. Penting untuk memprioritaskan intervensi dan inisiatif yang meningkatkan kesadaran, edukasi. Di bawah koordinasi BKKBN, secara nasional pemerintah membentuk 200 ribu TPK yang beranggotakan tiga orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bidan, kader KB, dan tim penggerak PKK menjadi anggota TPK dan merupakan ujung tombak dalam upaya ini. (Puspita, dkk, 2019). Upaya pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) ini bertujuan sebagai langkah preventif dalam ketahanan keluarga. TPK bertugas membantu komunikasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat (Sari dan Rahyanti, 2022). Secara khusus sasaran TPK adalah keluarga, dimana selama ini pemberdayaan yang diberikan lebih banyak pada keterlibatan wanita. Oleh karena itu perlunya pengembangan kapasitas TPK berbasis gender yang memahami dan mendasarkan upaya pemberdayaan pada peran dan hubungan gender di dalam keluarga untuk mencapai ketahanan keluarga yang kuat.

Penelitian ini menggunakan teori pendampingan sosial dari Parsons, dkk. (Suharto, 2014) dimana kerangka konseptual digunakan untuk memahami dan mendukung proses pemberdayaan individu atau kelompok dalam mencapai perubahan positif. Teori ini menekankan dukungan sosial dan interaksi antar individu atau kelompok dengan lingkungan mereka. Perspektif teori ini melihat kapasitas individu sebagai aspek yang penting, yaitu; 1) pemahaman potensi, ini melibatkan mengidentifikasi kekuatan, bakat, minat dan sumber daya yang ada dalam diri individu, 2) Peningkatan keterampilan, kapasitas individu dapat ditingkatkan melalui pengembangan keterampilan yang relevan, 3) Pengetahuan dan informasi, pengetahuan yang relevan dan akses terhadap informasi merupakan komponen penting dalam kapasitas individu karena dapat membantu individu untuk memperoleh pengetahuan dan sumber daya yang dapat digunakan, dengan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan mengambil langkah yang tepat, 4) Dukungan emosional membantu individu mengatasi keraguan atau ketidakpastian, dan 5) Pemberdayaan partisipatif, individu harus diberdayakan untuk aktif terlibat.

Upaya pembentukan ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Enrekang dalam menurunkan prevalensi, peran TPK yang berbasis pada permasalahan komunitas dalam memahami nilai sosial dan budaya masyarakat lokal menjadi sangat menentukan. Informasi mengenai dinamika dalam pembentukan ketahanan keluarga menjadi sangat penting bagi pendampingan TPK bagaimana memahami peran dan hubungan gender di dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan perlunya dukungan dan pendampingan khusus untuk membantu keluarga bertahan dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan pemberdayaan keluarga, dalam hal ini pendampingan, berbasis gender dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga berperspektif gender dapat berkontribusi signifikan mengatasi masalah yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivis yang mencoba membangun pengetahuan dan pemahaman secara aktif oleh informan melalui proses interpretasi dan konstruksi sosial. Penelitian dilakukan di Kecamatan Baraka, Desa Bone Bone, Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan salah satunya memiliki angka stunting tertinggi dibanding seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian adalah 6 orang tim pendamping keluarga, 3 masyarakat (Stunting, Pernikahan anak dan ibu yang bercerai) dan 1 kepala dusun. Data dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi partisipatif, dan analisis naratif. Dengan demikian dapat memahami konstruksi individu atau kelompok terhadap realitas sosial dan

pemahaman informan tentang dunia disekitar mereka. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan mulai tahun Desember 2022 sampai Februari 2023.

3. ANALISIS DATA

Peran penting keluarga dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif sangat diperlukan. Nilai luhur dalam masyarakat dan pengetahuan yang baik dan kreatif berkembang dalam keluarga, selanjutnya ditransmisikan secara alami oleh orang tua kepada anak mereka. Fungsi strategis keluarga ini, menjadi pijakan penting dalam kemajuan bangsa yang bergantung pada kualitas keluarga. Kualitas keluarga sendiri, bergantung pada peran serta orang tua dan lingkungan sosial. Keluarga dan lingkungan sosial merupakan dua sisi yang saling terhubung. Menurut Linton (Mardiya, 2021), keluarga dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga, termasuk dalam tata laksana pola asuh.

Pemberdayaan berperspektif gender dalam ketahanan keluarga adalah sebuah konsep yang mendasarkan upaya pemberdayaan pada peran dan hubungan gender di dalam keluarga. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, menjalankan peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga, serta mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender untuk mencapai ketahanan keluarga yang kuat. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif di dalam rumah tangga, di mana anggota keluarga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Pemberdayaan ini melibatkan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan berbasis gender yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan keluarga.

Pemberdayaan berperspektif gender tidak berarti mendiskriminasi atau mengabaikan peran yang sudah ada dalam keluarga. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang, di mana peran dan kontribusi semua anggota keluarga dihargai dan diakui dengan baik. Hal ini berarti mengakui bahwa baik pria maupun wanita memiliki kepentingan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda dalam keluarga, dan bahwa kehidupan yang adil dan harmonis dapat tercipta dengan memastikan partisipasi aktif dan kesetaraan di antara semua anggota keluarga. Menjadi penting pemahaman dan pengenalan akan peran yang berbeda antara pria dan wanita dalam merawat anak-anak, mengambil keputusan keluarga, membagi tugas rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Melalui pendekatan ini, keluarga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, keseimbangan kerja-keluarga yang lebih baik, serta mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat peran gender yang tidak seimbang.

Pendekatan pemberdayaan berperspektif gender dalam ketahanan keluarga berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan partisipasi semua anggota keluarga. Melalui pendekatan ini, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling mendukung, dan adil, yang berkontribusi pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan keluarga secara keseluruhan. Realita yang dihadapi wanita pada sebuah keluarga terutama seorang ibu atau wanita yang memiliki peran dan dapat melakukan banyak hal, ada begitu banyak peran seorang ibu yang menjamin keseimbangan dalam sebuah keluarga, sehingga kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya (Saragih & Ari Ganjar Herdiansah, 2022). Dalam keluarga, wanita bisa menjadi ibu, istri dan anak, peran ini membutuhkan tugas yang relevan dengan peran mereka, ibu memainkan peranan penting dalam mengasuh anak dan memberikan pendidikan secara luas.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga adalah Program Keluarga Harapan, dimana program ini memfokuskan pada wanita sebagai *agent of change* yang akan menerima bantuan sosial berupa dana untuk mengakses layanan pendidikan dan

Kesehatan, pemberian bantuan PKH ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga (Saragih dan Herdiansah, 2022). Secara umum PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran, mengubah perilaku, inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan.

Pemberdayaan berbasis gender, pemberdayaan perempuan merupakan faktor kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai dasar analisis ini didasarkan pada peran penting perempuan dalam mempengaruhi kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga dengan cara yang signifikan (Rahmawati, Alvina Clarissa, & Siska Ayu Tiara Dewi, 2019). Dalam hal ini, peran wanita dalam peningkatan sumber daya manusia sangat besar karena hingga saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas pengasuhan dan pendidikan keluarga dibawah tanggung jawab wanita. Karena itu, upaya peningkatan SDM yang dilakukan wanita dalam keluarga berpengaruh langsung pada tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Dalam proses pemberdayaan, dibutuhkan suatu strategi karena dalam pemberdayaan dilakukan secara individu maupun secara kolektif sehingga dibutuhkan strategi cara pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pemberdayaan dalam konteks ini dilihat sebagai proses membantu individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat guna dapat meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, sosio-ekonomi, politik, serta mengembangkan pengaruh perbaikan lingkungan sendiri (Rahma, dkk, 2023).

Upaya mengatasi masalah angka stunting, perkawinan anak dan perceraian yaitu memperkuat ketahanan keluarga dengan memberdayakan masyarakat melalui keluarga. Pembentukan dan keterlibatan TPK (Tim Pendamping Keluarga) merupakan sebuah strategi pendekatan yang melibatkan anggota masyarakat lokal untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Pendekatan berbasis kekuatan ini berpendapat bahwa keluarga dapat bertahan hidup walaupun ada tekanan, dapat mengatasi dan beradaptasi dengan baik. Model penyesuaian dan adaptasi keluarga menekankan proses antar faktor risiko dan faktor protektif untuk mencapai ketahanan keluarga (Sunarsih, dkk, 2021). Tujuan utama TPK adalah membantu keluarga dalam mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. (Muchlis, dkk, 2022). TPK bertugas mendampingi keluarga yang memiliki risiko stunting.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat mengatasi permasalahan baik itu stunting yaitu pembentukan kelompok yang bertujuan sebagai langkah preventif dalam mengatasi permasalahan yang ada, TPK akan membantu dalam hal komunikasi pada tenaga Kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan (Sari dan Rahyanti, 2022). Pendampingan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses keluarga yang berisiko stunting, seperti ibu hamil, ibu pasca bersalin, anak usia 0 – 59 bulan, serta calon pengantin atau pasangan usia subur. Pendampingan dilakukan selama 3 bulan pranikah dengan tujuan mendeteksi dan mengurangi faktor risiko stunting. Tim pendamping keluarga memiliki tugas khusus, yaitu; 1) Melakukan skrining pada 3 bulan pranikah untuk mengidentifikasi risiko stunting, 2) Memberikan pendampingan kepada ibu hamil melalui pemantauan dan pemeriksaan secara berkala, 3) Memberikan informasi dan edukasi (KIE) tentang keluarga berencana pasca persalinan, serta melakukan rujukan jika diperlukan. Dengan melakukan pendampingan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keluarga dan memberikan layanan yang tepat guna untuk mengurangi risiko stunting.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, setiap anggota TPK memiliki peran yang dibagi sebagai berikut: 1) Bidan bertugas sebagai koordinator pendamping keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, 2) Kader/Pengurus TP PKK tingkat Desa/Kelurahan bertugas sebagai penggerak dan fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, serta menjadi perantara antara keluarga dengan pelayanan yang ada, 3) Kader KB bertugas sebagai pencatat

dan pelapor data serta perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran. Untuk mencapai hasil yang optimal, TPK harus melalui tiga langkah kerja antara lain; 1) TPK perlu berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terkait dengan rencana kerja, sumber daya serta pemecahan kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan, 2) Pelaksanaan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial bagi keluarga sasaran prioritas dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan mereka, 3) TPK bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan serta pemantauan keluarga yang berisiko stunting sebagai informasi yang akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan data di lapangan bahwa TPK memiliki usia rata-rata di bawah 40 tahun dan memiliki pendidikan PT non kesehatan. Pengetahuan yang memadai dianggap penting dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian yang disebutkan, pengetahuan merupakan faktor yang relevan dalam peran dan fungsi kader TPK, kader TPK bertugas untuk memberikan penyuluhan efektif kepada masyarakat, menggunakan metode fasilitas pelayanan dan mengalokasikan bantuan sosial kepada keluarga yang berisiko. Berdasarkan data di lapangan menyimpulkan tidak adanya pengaruh edukasi terhadap tingkat pengetahuan TPK yang menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan mungkin tidak terlalu berhasil meningkatkan pengetahuan mereka secara signifikan. Meskipun TPK menerima edukasi, hasilnya menunjukkan tidak ada peningkatan edukasi yang lebih.

Menurut Mubarak dalam (Sari dan Rahyanti, 2022) pengetahuan seseorang dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi pendidikan, usia, minat, pengalaman dan lingkungan, faktor-faktor ini berperan dalam membentuk tingkat pengetahuan seseorang dan dapat saling mempengaruhi; 1) pendidikan; tingkat pendidikan seseorang memainkan peran penting dalam proses pembelajaran, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah mereka menerima dan memahami informasi, proses belajar yang sistematis dan mendapatkan akses terhadap sumber pengetahuan yang lebih luas dapat meningkatkan tingkat pengetahuan seseorang. 2) usia juga mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, seiring bertambahnya usia, daya tangkap dan pola pikir seseorang cenderung berkembang, dalam konteks penelitian ini, Sebagian besar responden berusia kurang dari 40 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin berada pada rentang usia dimana daya tangkap dan pola pikir dalam tahap perkembangan. 3) Minat individu terhadap pengetahuan tertentu dapat memotivasi mereka untuk mencari informasi dan memperdalam pengetahuannya, ketertarikan terhadap suatu hal akan mempengaruhi keinginan dan kemampuan seseorang untuk belajar dan mengembangkan pengetahuannya dalam bidang tersebut. 4) Pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan dan situasi tertentu juga berperan dalam membentuk pengetahuan seseorang. 5) Lingkungan sosial, budaya dan pendukung juga berperan dalam membentuk pengetahuan seseorang, lingkungan yang memberikan akses terhadap sumber-sumber informasi yang luas dan mendukung pembelajaran dapat membantu meningkatkan tingkat pengetahuan seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, tampaknya terdapat ketidakhubungan antara pemberian pendidikan kepada kader TPK dan Tindakan yang dilakukan oleh kader TPK. Dimana sifat manusia ingin tahu tentang sesuatu mendorong mereka untuk mencari pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan menurut Notoatmodjo 2005 dalam (Sari dan Rahyanti, 2022). Tindakan adalah gerakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tubuh sebagai respons terhadap rangsangan atau adaptasi dari lingkungan. Tindakan seseorang terhadap suatu stimulus banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Dalam konteks ini, pengetahuan yang dimiliki seseorang mungkin tidak selalu secara langsung mengarah pada tindakan yang sesuai. Meskipun pengetahuan yang memadai dapat

memberikan dasar dan pemahaman yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang tepat, tetapi faktor-faktor lain seperti kepercayaan, nilai-nilai, motivasi dan kondisi lingkungan juga memainkan peran penting dalam menentukan Tindakan seseorang. Dalam hal ini, meskipun kadet TPK telah diberikan pendidikan dan memiliki pengetahuan tertentu, faktor-faktor lain seperti kepercayaan, perasaan dan faktor lingkungan lebih mempengaruhi tindakan atau perilaku yang mereka tunjukkan. Oleh karena itu, hubungan antara pengetahuan dan tindakan tidak selalu sistematis dan dapat bervariasi dalam setiap individu atau situasi tertentu.

Berdasarkan data dilapangan memperlihatkan dalam perspektif gender, kapasitas TPK dapat dipengaruhi oleh peran atau stereotip gender yang ada dalam masyarakat, antara lain: 1) kesetaraan gender itu sendiri, yang mana telah disebutkan di atas, bahwa memberikan kesempatan yang sama baik itu bagi pria dan maupun Wanita yang terlibat dalam peran TPK, semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, sumber daya dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai TPK. 2) Pengetahuan dan kesadaran gender, TPK perlu memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu gender dan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat, mereka harus mampu mengenali dan mengatasi ketimpangan gender yang mungkin terjadi dalam lingkungan mereka, pemahaman ini dapat membantu mereka memberikan dukungan yang sesuai dan relevan kepada keluarga yang mereka damping. 3) keterlibatan masyarakat, TPK perlu berinteraksi dengan masyarakat secara luas termasuk melibatkan baik pria maupun wanita dalam kegiatan pemberdayaan keluarga, mereka harus mendorong partisipasi aktif dari semua anggota keluarga termasuk memperhatikan dan menghargai kontribusi yang berbeda dari pria dan wanita dalam konteks keluarga. 4) sensitivitas terhadap kebutuhan keluarga, TPK harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan masalah yang unik bagi setiap keluarga yang mereka damping, mereka harus mampu menghargai dan menghormati peran berbeda dalam konteks keluarga, serta memastikan bahwa layanan dan dukungan yang diberikan bersifat inklusif dan relevan bagi semua anggota keluarga.

Program pemberdayaan masyarakat, dapat dianggap berhasil apabila sukses membangun kesadaran masyarakat. Poin penting dalam upaya ini adalah berubahnya pola pikir masyarakat. Tanggung jawab ini tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan diperlukan upaya sinergis dan kolaboratif oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (Hatimah dan Lutfiansyah, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga menjadi bagian terpenting dalam dalam pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Nilai-nilai luhur dan pengetahuan yang baik dan kreatif dapat berkembang di dalam keluarga dan secara alami ditransmisikan antara orang tua dan anak-anaknya. Kualitas keluarga tergantung pada peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Hubungan antara keluarga dan lingkungan masyarakat saling terhubung dan saling mempengaruhi. Pemberdayaan berspektif gender dalam ketahanan keluarga adalah konsep yang mengakui peran dan hubungan gender dalam keluarga. Konsep ini mendorong kesetaraan dan keadilan gender untuk mencapai ketahanan keluarga yang kuat. Pemberdayaan ini melibatkan penghilangan diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan keluarga, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang dimana peran dan kontribusi semua anggota keluarga. Salah satu Program Keluarga Harapan adalah bagaimana mengupayakan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang fokus pada pemberdayaan wanita sebagai agen perubahan. Pendekatan pemberdayaan berperspektif gender juga dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah stunting, perkawinan anak dan perceraian. TPK merupakan strategi pendekatan yang melibatkan anggota masyarakat lokal untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada

keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. TPK membantu keluarga dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Pengakuan

-

REFERENSI

- Hatimah, I., & Dadang Yunus Lutfiansyah. 2022. *Pendampingan Keluarga Melalui Program Parenting Untuk Menekan Angka Stunting di Kabupaten Cirebon*. (E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdiman, Vol. 3 edisi I).
- Mardiya, D. (2021, Februari). Diakses pada Juni 2023 di <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1332/keluarga-kedudukan-dan-perannya-dalam-pembangunan>
- Muchlis, N., Haeruddin, dan Nurul, S. 2022. *Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Maiwa Sebagai Lokasi Khusus Stunting Kabupaten Enrekang*. (Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes. Januari 2022; Vol. 13 edisi I)
- Puspita, D. R., Wahyuningrat, Pawrtha Dharma, dan Alizar Isna. 2019. *Pengembangan Kapasitas Penyuluhan Berbasis Masyarakat Berperspektif Gender Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*. (Dinamika Journal, Vol. 1 edisi IV).
- Rahma, P. A., Gili Aargenti, dan Haura Atthahara. 2023. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang*. (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 edisi 4).
- Rahmawati, D. N., Alvina Clarissa, dan Siska Ayu Tiara Dewi. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Jakarta; Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak.
- Saragih, D. E., dan Ari Ganjar Herdiansah. 2022. *Peran Wanita Dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender*. (Sosio Informa, Vol. 8 edisi III).
- Sari, N. A., dan Ni Made Sri Rahyanti. 2022. *Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Pencegahan Stunting*. (Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, Vol. 7 edisi IV).
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Sunarsih, T., Triani Marwati, dan Endah Puji Astuti. 2021. *Model Pemberdayaan Wanita Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Akibat Dampak Covid-19 (Upaya Peningkatan Tumbuh Kembang Anak)*. (Jurnal Jarlit. Vol. 17).